

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Proses Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Aji, Bayu. *Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Darmawan, Hadi. *Hukum dan Teknologi Informasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fathurrahman. *Asset Recovery dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Firdaus, Anwar. *Blockchain dan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.
- Gunawan, Toni. *Penegakan Hukum terhadap Aset Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartono, Sri. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan: Perspektif Global dan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hidayat, Ahmad. *Kripto dan Kejahatan Finansial di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2023.
- Hidayati, Rina. *Regulasi Kripto dan Perlindungan Investor di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Ismail, Ferry. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Aset Digital*. Jakarta: Prenadamedia, 2023.
- Kurniawan, Fajar. *Hukum Siber dan Kejahatan Digital di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.

- Lestari, Winda. *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Lubis, Zulfikar. *Pencucian Uang dan Kripto: Studi Hukum dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mahendra, Raka. *Digital Forensic untuk Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Mahfud, Anwar. *Kriminalisasi Aset Digital: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, Herlambang. *Hukum Keuangan Negara dan Korupsi di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.
- Pradana, Rian. *Digital Crime dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Genta Press, 2021.
- Priyanto, Agus. *Kriminalitas Digital dan Penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Purnama, Rudi. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Purwanto, Imam. *Hukum Keuangan Negara dan Korupsi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Putra, Bagus. *Regulasi Cryptocurrency di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Rahman, Dwi. *Teknologi Blockchain dan Tantangan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Riyanto, Budi. *Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Santoso, Budi. *Kriminalitas Dunia Maya dan Penegakan Hukumnya*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Saputra, Joko. *Aset Kripto dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Setiawan, Andri. *Teknologi Finansial dan Implikasinya dalam Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Setyawati, Arif. *Kriminalisasi Teknologi Finansial dan Perlindungan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Satria, Dimas. *Regulasi Teknologi Finansial dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Sri, Hartono. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan: Perspektif Global dan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Surya, Anton. *Perkembangan Hukum Pidana di Era Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Susanto, Anang. *Blockchain dan Cryptocurrency: Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wijaya, Rudi. *Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Widodo, Bagas. *Cybercrime dan Aset Kripto: Kajian Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP: Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni, 1982.
- Yusuf, Muhammad. *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013.

Karya Tulis/Jurnal

- Afrizal. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (Oktober 2021).
- Anisa, Dinda, Tuti Anggraini, dan Khairina Tambunan. "Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Alternatif Berinvestasi di Indonesia." *Owner* 7, no. 3 (July 2023): 2674–2682.
- Arief Budiman, Elis Rusmiati, dan Mien Rukmini. "Alat Bukti Mata Uang Elektronik pada Proses Penyidikan dalam Rangka Pembaharuan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 1 (2025): 12.

- Aruan Ukkap Marolop. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP." *Lex Crimene* 3, no. 2 (2014): 77–85.
- Aulia, Rizky. "Peran Penyidik dalam Penyitaan Aset Digital pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas* 5, no. 2 (2024): 115–128.
- Bagaskara, Dwi. "Tantangan Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kripto." *Jurnal Cyber Law* 3, no. 1 (2023): 78–90.
- Bayu Butar Butar. "Perspektif Hukum terhadap Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus Binomo Indra Kenz)." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 397–403.
- Cahyani, Siti. "Implikasi UU ITE terhadap Penggunaan Aset Kripto dalam Transaksi Ilegal." *Jurnal Teknologi dan Hukum* 4, no. 2 (2022): 155–169.
- Dewantara, Rio. "Blockchain Forensics dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kriminalistik Digital* 7, no. 1 (2025): 33–49.
- Erwin Susilo dan Muhammad Rafi. "Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (February 15, 2025): 450.
- Firmansyah, Arif. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture terhadap Aset Kripto: Analisis Hukum Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 3 (2024): 201–217.
- Hakim, Raden. "Efektivitas Perampasan Aset Kripto dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Integritas* 8, no. 1 (2023): 77–93.
- Hanugrah Titi Habsari et al. "Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia." *Fundamental* 6, no. 1 (2025): 51–68.
- Kamal, Ahmad. "Kripto sebagai Objek Penyitaan: Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2024): 145–160.
- Made et al. "Legalitas Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu* 6, no. 12 (February 2018): ISSN 2303-0569.
- Marfuatul Latifah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 18.
- Mawadha Afriza Said dan Nurharyati Panigoro. "Melirik Dinamika Investasi Cryptocurrency dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *Journal of Management & Business* 8, no. 2 (2025): 204–218.

- Nazli Ismail Nawang dan Ida Madieha Abd Ghani Azmi. "Cryptocurrency: An Insight into the Malaysian Regulatory Approach." *Psychology and Education Journal* 58, no. 2 (February 1, 2021): 1645–1652.
- Nugraha, Dimas. "Cryptocurrency dan Tantangan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer* 12, no. 4 (2023): 231–248.
- Prakoso, Luthfi. "Penyitaan Aset Digital pada Tahap Penyidikan: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2023): 101–118.
- Sumaidi. "Kajian terhadap Penyitaan sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum." *Legalitas* 8, no. 1 (2016): 240–241.
- Swity Milen. "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024).
- Syafrudin, Ilham. "Tindak Pidana Korupsi dan Kripto: Regulasi dan Implementasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum* 15, no. 3 (2024): 321–338.
- W. C. Dewi. "Perkembangan Mata Uang Kripto di Tahun 2023: Implikasi terhadap Sistem Keuangan Konvensional." *Circle Archive* 1, no. 2 (Oktober 10, 2023): 1–11.

Internet

- Ali Raza. "Apa itu Dogecoin dan Bagaimana Cara Kerjanya." Last modified 2022. Accessed June 29, 2025. <https://coinjournal.net/Dogecoin>.
- Binance Academy. "Apa Itu Bitcoin? Panduan Lengkap." Last modified 2023. Accessed June 10, 2025. <https://academy.binance.com/id/articles/what-is-Bitcoin>.
- Bitcoin.org. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." 2008. Accessed June 4, 2025. <https://Bitcoin.org>.
- Blockchain.com. "Bagaimana Blockchain Bekerja?" Last modified 2023. Accessed June 12, 2025. <https://www.blockchain.com/learning-portal/how-blockchain-works>.
- CoinDesk. "The State of Cryptocurrency Regulation in 2024." Last modified 2024. Accessed July 14, 2025. <https://www.coindesk.com/regulation>.

- Cointelegraph. “Crypto Crime and Asset Seizure: A Legal Perspective.” Last modified 2023. Accessed June 15, 2025. <https://cointelegraph.com/news/crypto-crime-asset-seizure>.
- CNBC Indonesia. “BI Ingatkan Risiko Kripto dan Larangan Jadi Alat Pembayaran.” Last modified 2023. Accessed June 9, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/bi-ingatkan-risiko-kripto>.
- Deloitte. “Managing Digital Assets in Fraud Investigations.” Last modified 2022. Accessed June 16, 2025. <https://www.deloitte.com/insights/digital-assets-fraud>.
- Financial Action Task Force (FATF). “Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets.” Last modified 2023. Accessed June 17, 2025. <https://www.fatf-gafi.org/publications/virtualassets>.
- Harvard Law Review. “Notes How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement.” June 2018. Accessed June 2, 2025. <https://harvardlawreview.org/print/vol-131/how>.
- Hukum Online. “Penggeledahan dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka.” Last modified 2025. Accessed May 31, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f>.
- International Monetary Fund (IMF). “Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations.” Last modified 2023. Accessed June 20, 2025. <https://www.imf.org/virtual-currencies>.
- Kejaksaan Tinggi Jambi. “Penanganan Aset Kripto Dalam Perkara Pidana.” Last modified October 5, 2023. Accessed June 6, 2025. <https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/penanganan-aset-kripto-dalam-perkara-pidana/>.
- Kompas.com. “Mengenal Cara Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana.” Last modified 2023. Accessed June 11, 2025. <https://www.kompas.com/hukum/penyitaan-aset-tindak-pidana>.
- Kementerian Keuangan RI. “Pengaturan Pajak atas Aset Kripto di Indonesia.” Last modified 2023. Accessed June 19, 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/aset-kripto-pajak>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Perlindungan Investor Aset Kripto.” Last modified 2023. Accessed July 21, 2025. <https://www.ojk.go.id/kripto-investor-protection>.

Pengadilan Negeri Surabaya. “Prosedur Permohonan.” Last modified 2011. Accessed June 7, 2025. <https://pn-surabayakota.go.id/permohonan-informasi-publik/>.

PwC. “Crypto Asset Compliance and Seizure.” Last modified 2024. Accessed June 18, 2025. <https://www.pwc.com/crypto-asset-compliance>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “Cryptocurrencies and Money Laundering Risks.” Last modified 2023. Accessed June 22, 2025. <https://www.unodc.org/cryptocurrency-risk>.

World Bank. “Digital Asset Regulation and Enforcement Challenges.” Last modified 2023. Accessed July 23, 2025. <https://www.worldbank.org/digital-assets-regulation>.

Undang-Undang

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Indonesia. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 20/6/DKSP Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.